

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA NIAGA KELAPA

Oleh: Dedy Iskandar

Email: deddyiskandar44@gmail.com

Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Pekanbaru

Kampus Bina Widya, Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

28292 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Regional Regulation Indragiri Hilir Regency No 3 of 2018 on Commerce Coconuts is important because the coconut is a potential preeminent that can enhance the well being of coconut farmers at Indragiri Hilir Regency. Observations from the field have some concern about Implementation Regional Regulation Indragiri Hilir Regency No 3 of 2018 on Commerce Coconut. The main objective of study is to examine the Implementation of Regional Regulation Indragiri Hilir Regency No 3 of 2018 on Commerce Coconuts and any limiting factor A George C. Edward III Riant Nugroho (2009:636). Is used to determine the sample of the research. The methods of the research is qualitative research by using approach case studies. To collect the data in this research were interview, observation, documentation. It was found that the Implementation of Regional Regulation Indragiri Hilir Regency No 3 of 2018 on Commerce Coconut haven't received yet because there are some contributing factors that there's no price for the words reference to coconuts as free stuff, based on supply and demand the government can't adjust the price margins of the coconuts between the coconut growers and the coconut manager meanwhile, the inhibitory factor is that of uncreative human resources it is better for the Indragiri Hilir Government to cooperate with coconuts businessmen and coconuts companies to implement The Regional Regulation No 3 of 2018 on Commerce coconuts.

Keywords: *Implementation, Regional Regulation, Commerce Coconuts.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dimana setiap daerahnya mempunyai sumber daya alam yang beranekaragam. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara dan daerah. Pengembangan pertanian masih menjadi fokus pemerintah saat ini. Pada dasarnya, tujuan pengembangan pertanian tidak hanya sebagai usaha untuk meningkatkan produksi pertanian tetapi yang paling penting adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya unggulan dibidang pertanian yaitu komoditi kelapa dengan memiliki luas perkebunan kelapa terbesar di Indonesia dengan luas kebun 515,168 Ha. (BPS Provinsi Riau) Kelapa yang termasuk kedalam sub sektor perkebunan ini telah menjadi salah satu komoditi ekspor Indonesia yang telah memasarkan ke Negara-Negara di Asia.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Kabupaten yang menjadikan perkebunan sebagai basis ekonominya. Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki luas perkebunan kelapa terbesar di Indonesia, sudah menjadi kewajiban pemerintahnya untuk dapat mengimplementasikan peraturan daerah yang jelas terkait komoditi kelapa agar dapat menjaga stabilitas harga kelapa, memperkuat peran pengusaha kelapa, dan menjaga

stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa daerah.

Bahwa kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, terutama sebagai sumber penghasilan masyarakat dan daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, sumber bahan baku industri makanan dan minuman serta optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Dari berbagai komoditas itu kelapa lokal menjadi primadona yang banyak dibudidayakan oleh petani. Potensi wilayah menjadi modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Bila ditinjau dari arah pembangunan dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Kabupaten sentra produksi terbesar kelapa di Indonesia dan sebagian besar penduduknya menjadi petani kelapa dan berusaha di sektor kelapa sebagaimana mata pencaharian utamanya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir yang mana telah tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa sebagai dinas yang bertanggung jawab atas segala bentuk perdagangan tata niaga kelapa yang ada di daerah Kabupaten Indragiri Hili.

Pada umumnya, dengan jumlah produksi buah kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang mencapai puluhan juta kilogram dapat merubah kondisi perekonomian masyarakatnya apabila dimanfaatkan menjadi berbagai bentuk produk turunan dari

sebutir kelapa yang nilai ekonominya dapat mencapai sepuluh kali lipat dari pada dijual dalam bentuk kelapa bulat. Kurangnya pemanfaatan atau pengelolaan buah kelapa untuk dijadikan produk turunan yang memiliki nilai ekonomis karena kurangnya industri atau kelompok usaha petani kelapa yang memproduksi dan memanfaatkan kelapa serta minimnya pengetahuan dalam pengelolaan kelapa untuk membuat produk turunan dari seluruh bagian buah kelapa yang bernilai ekonomi tinggi sehingga berdampak terhadap ketergantungan petani akan harga penjualan kelapa bulat.

Tabel 1.1
Perkembangan Harga Kelapa Bulat Dari Industri Kabupaten Indragiri Hilir Dari Tahun 2018-2019

No	Bulan	Tahun	
		2018	2019
1	Januari	2500	1450
2	Februari	2500	1450
3	Maret	2500	1450
4	April	2200	1450
5	Mei	1600	1500
6	Juni	1400	1500
7	Juli	1800	1550
8	Agustus	1500	1600
9	September	1700	-
10	Oktober	1700	-
11	November	1400	-
12	Desember	1550	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir 2019

Dari tabel 1.1 dijelaskan bahwa harga beli kelapa bulat dari industri kepada pengusaha kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2018 sampai dengan

tahun 2019 mengalami fluktuasi, puncak tertinggi harga kelapa terjadi pada bulan Januari sampai Maret 2018 yakni pada angka 2500/kg dan harga terendah terjadi pada bulan Juni dan November 2018 yaitu pada angka 1400/kg.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata-Tata Niaga Kelapa?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata-Tata Niaga Kelapa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata-Tata Niaga Kelapa.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata-Tata Niaga Kelapa.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis
Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah, serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang di dapat selama masa perkuliahan.
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan rekomendasi dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat

2. Konsep Teori

2.1 Kebijakan Publik

Menurut **Dunn** dalam (**Nugroho,2003:58**), masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai,kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalu tindakan kebijakan publik (karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis,sehingga pemecahan masalah memerlukan pendekatan holistik (holistic haproach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan keseluruhan yang tdak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari faktor yang lainnya. Untuk itu,diperlukan kebijakan publik sebagai instrument pencapaian tujuan pemerintah.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut **Nugroho (2017:728)** Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kegiatan dapat mencapai tujuannya dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut **Nugroho (2017:728)** implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan tersebut.

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (**Sumaryad (2005:88)**).

a. Komunikasi

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari variabel sumber daya. Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalah pahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

b. Sumberdaya

Sumber daya meliputi: (1) staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, (2) informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi, (3) kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan dilakukan semuanya, (4) sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang-undang tidak diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Disposisi atau sikap

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Jika

pe;aksanaan kebijakan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian untuk mengoptimalkan penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penelitian *case study* (studi kasus).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan Kabupaten pertama penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

3.3 Informasi Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian diambil dengan menggunakan metode *snowball sampling*. informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Kasi Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bapak Camat Kecamatan Mandah.
5. Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir
6. Pengepul/Toke kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

3.4 Sumber Data

a. Data primer

Data tersebut langsung diperoleh dari informan, data diperoleh melalui wawancara Adapun data primer ini peneliti peroleh dari 6 (enam) informan yang langsung peneliti wawancarai secara langsung berkaitan dengan:

1. Wawancara berkaitan dengan bagaimana Implementaasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Wawancara tentang faktor yang menghambat dalam Implementaasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah jadi berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, hasil laporan dan penelitian terdahulu (jurnal).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur yang mana peneliti mengharapkan informasi yang lebih dalam dari informen sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informen. Selain itu peneliti juga mengajukan berbagai pertanyaan yang lebih terarah pada suatu tujuan.

b. Observasi

Yaitu Pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi pada objek yang kita teliti, istilah sederhananya adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata

Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Data observasi ini didapat dengan melakukan observasi langsung ke lokasi perkebunan, tempat jual beli kelapa, dan di dinas Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Adapapun untuk dokumentasi peneliti sajikan pada lampiran yang peneliti dapatkan pada saat penelitian ini berlangsung.

3.6 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

Pertama, tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scening hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa

Dalam bab ini akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir dan beberapa instansi yang terkait lainnya dengan permasalahan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata

sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.

Kedua, tahap selanjutnya peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut dan bagaimana kesan dari kedalaman penuturan informasi tersebut.

Ketiga, setelah itu peneliti lakukan dengan meng-coding data yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Keempat, tahap terakhir peneliti memaknai data dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk menjadikan peraturan daerah tentang tata niaga kelapa ini sebagai panduan bagi pemerintah daerah, pengusaha kelapa, dan petani kelapa pasca jual beli kelapa antara petani kelapa dengan pembeli kelapasecara terstruktur dan terpadu, pihak terkait berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan usaha mencari dan melaksanakan kegiatan mulai dari menyusun program sampai merealisasikan kelapangan, dimana pengelolaankelapa dan turunannya disini dapat menghasilkan berbagai macam

produk turunan sehingga menambah nilai ekonomi bagi petani kelapa. Dalam pelaksanaan program Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa ternyata ditemukan masalah-masalah yang menjadi kendala dalam melaksanakan program tersebut, maka peneliti mencoba mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa dengan menggunakan 4 (empat) pilar penilaian yang di kemukakan oleh Edward III, yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi adalah merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.

4.1.2 Sumber daya

Sumber daya merupakan aspek penting kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi karena ketika melaksanakan sebuah kebijakan tanpa adanya sumber daya sebuah kebijakan akan menjadi sia-sia dan tidak efektif. Oleh karena itu tenaga yang ahli dan relevan dalam ukuran yang tepat, karena pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya.

4.1.3 Disposisi

Faktor penting lain yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap implementer. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi kesalahan.

4.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama dari pihak-pihak yang lebih banyak. Jika terdapat suatu kelemahan dalam struktur birokrasi, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya yang ada menjadi tidak efektif dan menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Sebagai pelaksana sebuah kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi yang baik antar unit dalam organisasi yang ada. Aspek struktur terdapat dua cakupan yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Mekanisme adalah aspek pertama dalam kebijakan, biasanya sudah dibuat Standar Operasi Prosedur (SOP).

4.2 Faktor yang Menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa

Salah satu dari faktor penghambat akses menuju ke kecamatan dan perdesaan tidak memadai, kondisi jalan yang rusak parah bahkan ada jalan yang belum di bangun aspal, kemudian sebagian kecamatan dan perdesaan tidak bisa ditempuh dengan jalur darat harus menempuh jalur laut dengan menggunakan kendaraan air (Speedboard) membutuhkan anggaran yang besar ketika turun kelapangan, dan terjadinya pasang surut air laut.

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan program yang dilaksanakan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada implementor yang tepat.

4.2.2 Sumber Daya Manusia

Manusia adalah faktor penting dalam penggerakan organisasi, manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi, manusia dalam satu organisasi juga disebut personil. Sumber daya manusia atau personil adalah setiap orang yang menjalankan suatu pekerjaan (*job*), fungsi, kewajiban (*duty*), tugas (*task*), jabatan (*job position*), di dalam tangga dan atau kerangka organisasi yang mempunyai fungsi atau kedudukan dalam organisasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi.

4.2.3 Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan Edward III, yang menetapkan 4 (empat)

indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap komoditi kelapa masih belum optimal. Karena jika dilihat dari indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum ada kerjasama antara pelaku usaha dengan pemerintah faktanya dilapangan, banyak petani kelapa dan pengepul/toke belum mengetahui isi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa tersebut maka terjadilah permainan harga oleh pengepul/toke kelapa terhadap petani kelapa, namun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupaya semaksimal mungkin untuk dapat Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang tata niaga kelapa di Kabupaten Indragiri belum optimal disebabkan beberapa faktor yaitu sumber daya manusianya yang disini adalah petani kelapa yang pola pikirnyamasih pragmatis dan rendahnya daya kreatifitas membuat mereka ketergantungan akan harga jual kelapa bulat. Belum ada harga acuan pasar dunia karena kelapa adalah barang bebas bergantung pada supply and demand, belum diaturnya margin harga kelapa antara petani kelapa dengan pelaku usaha, dan belum adanya

kerjasama antara pelaku usaha dengan pemerintah dan juga keterbatasan anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus segera menerapkan margin tata niaga kelapa dengan mengacu pada harga pasar.
2. Pengusaha kelapa harus menyampaikan rencana dan realisasi perdagangan kelapa kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus meningkatkan pola kemitraan dengan cara mempermudah izin pengusaha kelapa nasional dan internasional dan membuat pasar lelang.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir harus mengubah pola pikir petani kelapa yang pragmatis dan rendahnya daya kreativitas dengan cara melakukan sosialisasi secara merata dalam artian melakukan sosialisasi diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Islamy, Irfan. 2009. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, Syarifullah. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2009. *Publik Policy, Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan publik*. Jakarta: Citra Utama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wahab, Solichin. 2001. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Lemlit UNPAD.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.